

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini meneliti tentang analisis kemandirian dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 – 2018 menggunakan rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio ketergantungan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi, pada akhirnya memberikan pemahaman dan informasi yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.

1. Dalam Rasio kemandirian untuk tingkat kabuapten/kota se-DIY, Kabupaten Gunung Kidul memiliki tingkat kemandirian paling rendah karena hanya memiliki rata-rata kemandirian sebesar 16% sedangkan Kota Yogyakarta berada pada tingkat kemandirian paling tinggi dengan rata-rata 60%.
2. Dalam Rasio ketergantungan untuk tingkat kabupaten/kota se-DIY terendah dimiliki oleh Kota Yogyakarta dengan rata-rata 63% dan untuk kategori tingkat ketergantungan tertinggi pada Kabupaten Gunung Kidul dengan prosentase rata-rata 83%. Selisih antara keduanya mencapai 20%.

3. Rata-rata tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota se-DIY masih dalam interval  $>50,00\%$  dengan kategori sangat tinggi. Dapat disimpulkan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana perimbangan.
4. Beberapa penyebab perbedaan tingkat kemandirian antar kabupaten/kota se-DIY yaitu :
  - a. Penggalian potensi beberapa daerah belum maksimal.
  - b. Kurang adanya pembangunan infrastruktur daerah.
  - c. Kurangnya SDM professional dalam pengelolaan kekayaan daerah.
  - d. Pengalokasian dana dari pemerintah pusat berbeda setiap kabupaten/kota tergantung pada kondisi wilayah, jumlah OPD, luas wilayah, dan luas lahan tembakau.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian di Kabupaten/Kota se-DIY, maka berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah sebaiknya berupaya meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada, mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pajak.
2. Perlunya pengelolaan keuangan yang baik untuk meminimalisir pengeluaran terhadap belanja daerah sehingga dana dapat dialokasikan untuk memaksimalkan PAD.

3. Perlu adanya peningkatan sektor pembangunan yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD dan kekayaan daerah (investasi).
4. Peningkatan kualitas SDM daerah sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja keuangan daerah.